



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 12 (dua belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: 1. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan; 2. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 30 Maret 2021
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penjelasan terkait Aset, kondisi keuangan dan hasil pengembangan investasi BPJS Ketenagakerjaan dalam 5 (lima) tahun terakhir; 2. Penjelasan terkait Defisit dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan terobosan yang akan diambil kedepan oleh BPJS Ketenagakerjaan; 3. Progres dan inovasi Kerjasama Program dan Pelatihan Vokasi BPJS Ketenagakerjaan dengan lintas sektor.
Ketua Rapat	: H. Ansory Siregar, Lc. / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

- Peserta Rapat : A. Fisik 23 orang Virtual 18 orang dari 50 orang  
Hadir dan Virtual Anggota Komisi IX DPR RI;  
B. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan:  
Muhammad Zuhri Bahri, beserta jajaran;  
C. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan: Anggoro  
Eko Cahyo, beserta jajaran.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, dibuka pukul 10.05 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk:
  - a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Komisi IX DPR RI dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan.
  - b. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk memaksimalkan kualitas kinerja dan pelayanan bagi para peserta.
  - c. Melakukan kajian yang intensif dan serius terhadap seluruh aturan perundang-undangan, dalam rangka usulan pengharmonisasian regulasi sehingga dapat menunjang peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan secara kelembagaan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk:
  - a. Merevisi Peraturan Direksi No. 19 Tahun 2017 Tentang Manajemen Kepegawaian yang membatasi masa kerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan maksimal usia 36 tahun dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Melakukan penyelarasan data kepesertaan dengan pihak pemberi kerja guna menghindari data kepesertaan yang berbeda atas penghasilan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan.
  - c. Menyempurnakan pedoman investasi dalam rangka meningkatkan keamanan investasi yang ditempatkan secara variatif di berbagai Lembaga keuangan dan dunia usaha.
  - d. Melaporkan rencana strategis program investasi BPJS Ketenagakerjaan 2021 kepada Komisi IX DPR RI.
3. Dalam rangka meningkatkan perluasan kepesertaan, Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan promosi dan sosialisasi program kepesertaan secara massif dan intensif.

4. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyiapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan secara reguler melaporkan kepada Komisi IX DPR RI.
5. Komisi IX DPR RI meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Pengawas menyampaikan:
  - a. Program Kerja dan Anggaran Tahun 2021.
  - b. Roadmap tentang perluasan kepesertaan program jaminan sosial termasuk pada peserta Bukan Penerima Upah (BPU), pekerja Informal dan peserta non aktif.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.25 WIB.

Jakarta, 30 Maret 2021

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



H. ANSORY SIREGAR, Lc.

A-414